

## Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya

Soya Ani Prasetyo<sup>1</sup> Rudy Sutanto<sup>2</sup> Fauzia Gustarina Cempaka Timur<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [prasetyosoya0@gmail.com](mailto:prasetyosoya0@gmail.com)<sup>1</sup> [rudi.sutanto071@gmail.com](mailto:rudi.sutanto071@gmail.com)<sup>2</sup> [fg.cempaka@idu.ac.id](mailto:fg.cempaka@idu.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Konflik di wilayah Papua khususnya aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), telah menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun internasional. Meskipun KSTP berdalih bahwa tindakan mereka adalah sebagai respons terhadap pelanggaran HAM dan penindasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh pemerintah Indonesia, faktanya mayoritas OAP menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Dukungan yang terbatas dari masyarakat Papua menunjukkan bahwa KSTP tidak mewakili seluruh kepentingan Masyarakat Papua. Terorisme di wilayah Papua adalah kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia untuk menciptakan negara independen. Konflik di Papua merupakan penggunaan kekerasan oleh kelompok dengan tujuan mencapai agenda politik tertentu melalui propaganda dan demonstrasi massa untuk mendukung kemerdekaan, referendum, dan isu pelanggaran hak asasi manusia (Karnavian, 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik aksi yang dilakukan oleh KSTP di Papua, yang memiliki motif politik dan separatisme. Aksi kekerasan dan terorisme KSTP telah menyebabkan dampak yang ekstrim terhadap keamanan, politik, dan sosial masyarakat di Papua. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang beranekaragam (multifaset) dalam menanggulangi terorisme, namun tantangan masih ada. Pembentukan Satuan Tugas dari Mabes TNI menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menahan aksi KSTP. Namun konflik terorisme di Papua memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Kesimpulannya, terorisme di Papua adalah ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI yang memerlukan penanganan serius, termasuk peningkatan status ancaman KSTP menjadi status Darurat Militer dan penerapan Operasi Militer Perang (OMP).

**Kata Kunci:** Papua, Strategi, Terorisme

### Abstract

The conflict in the Papua region, especially acts of terrorism carried out by the Papuan Separatist Terrorist Group (KSTP), has become a major concern both nationally and internationally. Even though KSTP argues that their actions are a response to human rights violations and oppression of Indigenous Papuans (OAP) by the Indonesian government, in fact the majority of OAP want Papua to remain part of the Republic of Indonesia. Limited support from the Papuan people shows that the KSTP does not represent all the interests of the Papuan people. Terrorism in the Papua region is a separatist group that seeks to separate Papua from the Republic of Indonesia to create an independent state. The conflict in Papua is the use of violence by groups with the aim of achieving a certain political agenda through propaganda and mass demonstrations to support independence, referendums and issues of human rights violations (Karnavian, 2017). This is in line with the characteristics of the actions carried out by KSTP in Papua, which had political and separatist motives. KSTP's acts of violence and terrorism have had an extreme impact on the security, political and social impacts of society in Papua. The Indonesian government has implemented a multifaceted strategy in tackling terrorism, but challenges still remain. The formation of a Task Force from TNI Headquarters is one of the most effective steps in containing KSTP actions. However, the terrorism conflict in Papua requires a comprehensive and collaborative approach to find a peaceful and sustainable solution. In conclusion, terrorism in Papua is a serious threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia which requires serious handling, including increasing the status of the KSTP threat to Military Emergency status and implementing War Military Operations (OMP).

**Keywords:** Papua, Strategy, Terrorism



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Wilayah Papua adalah salah satu daerah yang terus menerus mengalami konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Terdapat perubahan nomenklatur dari masa kemasa, mulai dari Organisasi Papua Merdeka (1963), Gerombolan Pengacau Keamanan (1973), Kelompok Kriminal Bersenjata (2013), Kelompok Kekerasan Bersenjata (2016), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (2017), Kelompok Separatis Teror (2021), Kelompok Teror (2021), Kelompok Separatis Teroris (2023) (Widjajanto, 2023). Kegiatan KSTP terus meningkatkan perhatian secara domestik dan internasional, terutama setelah KSTP membunuh Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, kepala cabang Badan Intelijen Negara di Papua, pada tahun 2021.

Kelompok-kelompok itu tidak 100% mendapat dukungan dari masyarakat Papua atau OAP (Orang Asli Papua), dikarenakan tidak sedikit dari OAP yang menjadi korban aksi kekerasan dan terorisme dari KSTP. KSTP berdalih jika tindakan yang mereka lakukan adalah karena OAP tersebut memihak ke Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara yang melakukan pelanggaran HAM di tanah Papua. Indonesia menurut KSTP dianggap telah melakukan penindasan terhadap aktivitas Politik, penolakan hak penentuan nasib sendiri, diskriminasi, marginalisasi, dan pelanggaran hak lainnya. Padahal sejatinya Indonesia sangat memperhatikan dan telah berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh OAP yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus), program pengentasan kelaparan ekstrem, pembangunan jalan (PPJWM) dan lain sebagainya.

## Tinjauan Pustaka

### Konsep Terorisme

Terorisme merupakan fenomena yang kompleks dan sulit didefinisikan secara tegas. Namun, dalam konteks ini, terorisme dapat dijelaskan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh kelompok atau individu dengan tujuan mencapai agenda politik, ideologis, atau agama tertentu (Reksoprodjo et al., 2018). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang pakar, Terorisme adalah sebuah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasional. Secara akademisi, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan", yang tidak berperikemanusiaan (Hamzah Junaid, 2013).

Penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Terorisme didefinisikan sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan (Ramadhanty, 2019). Terorisme melibatkan penggunaan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh kelompok atau individu tertentu. Tindakan ini dapat mencakup serangan fisik, pengeboman, penyanderaan, atau ancaman serius terhadap nyawa atau keamanan orang lain. Agenda Politik, Ideologis, atau Agama. Terorisme biasanya dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki agenda politik, ideologis, atau agama tertentu (Saella Fitriana, 2016). Mereka menggunakan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut atau untuk memaksakan pandangan mereka kepada orang lain, tujuannya untuk menciptakan ketakutan dan kecemasan, salah satu karakteristik utama terorisme adalah niatnya untuk menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara masyarakat umum atau pemerintah (Nasution, 2015). Terorisme sering kali dilakukan dengan cara yang menarik

perhatian media dan menciptakan dampak psikologis yang besar (Mitra Atallah Syahputra & Askana Fikriana, 2023) serta salah satu aspek yang sangat kontroversial dari terorisme adalah penggunaan target sipil yang tidak hanya menargetkan TNI dan Polri. Kelompok teroris sering kali menyerang warga sipil yang tidak bersenjata sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka atau untuk membuat dampak emosional yang lebih besar.

### **Terorisme di Papua**

Konflik di wilayah Papua telah menjadi perhatian utama dalam konteks keamanan nasional Indonesia, fenomena konflik di Papua melibatkan aparat negara (TNI & Polri) dengan kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut merupakan tindakan teror disertai upaya untuk memisahkan wilayah Papua dari kedaulatan Negara Indonesia, sehingga kelompok tersebut pada perkembangannya disebut dengan nama KSTP (Kelompok Separatis Teroris Papua). Berawal pada tahun 1940-an hingga 1960-an, terjadi gerakan separatis di wilayah Papua, yang saat itu masih bernama Papua Nugini dan dikuasai oleh Belanda.<sup>1</sup> Kelompok separatis, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), mulai muncul dan mengadvokasi kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1963 Papua Nugini menjadi wilayah yang dikelola oleh PBB, dan administrasinya beralih ke Indonesia. Hal ini memicu perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dari sebagian penduduk Papua. Pada 1969 diadakan referendum yang dikenal sebagai "Plebisit Pepera," yang kontroversial dan dianggap tidak adil oleh beberapa pihak.<sup>2</sup> Hasilnya adalah Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, namun, beberapa kelompok separatisme menolak hasil tersebut dan terus berjuang untuk kemerdekaan.

Dekade 1970-an hingga 1990-an, konflik separatis di Papua semakin memanas. Kelompok-kelompok tersebut lainnya menggunakan taktik gerilya dan serangan teror untuk mencapai tujuan kemerdekaan mereka. Awal 2000-an sampai dengan sekarang konflik semakin meresahkan dengan serangkaian serangan teror dan konfrontasi bersenjata antara kelompok separatis dan aparat keamanan Indonesia. Kelompok teroris di wilayah ini mulai menggunakan taktik terorisme dalam perjuangan mereka, sehingga secara resmi Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kala itu dijabat oleh Komisaris Jenderal Pol. Boy Rafli Amar menyebut kelompok tersebut dengan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).<sup>3</sup> Paham terhadap penyebab konflik terorisme di wilayah Papua sangat penting dalam upaya penanganan konflik dan pengembangan solusi yang berkelanjutan untuk perdamaian di wilayah ini. Isu Separatis adalah salah satu penyebab utama konflik terorisme di Papua.<sup>4</sup> Beberapa kelompok separatisme di wilayah ini masih memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia dan menggunakan taktik terorisme sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting. Beberapa masyarakat di Papua merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Ketidakpuasan ini dapat menjadi pendorong untuk mendukung atau bahkan bergabung dengan kelompok teroris.

Sejarah konflik antara Papua dan pemerintah Indonesia, terutama sejak penyerahan dari Belanda pada tahun 1963,<sup>5</sup> menciptakan ketegangan yang mendalam di wilayah ini. Beberapa kelompok separatis merasa bahwa mereka dipaksa menjadi bagian dari Indonesia dan terus berjuang untuk kemerdekaan mereka. Kelompok teroris di Papua juga telah diduga menerima dukungan dari pihak ketiga, termasuk negara-negara atau organisasi internasional. Dukungan

<sup>1</sup> <http://jmi.ipsklipi.go.id/index.php/jmiipk/article/viewFile/649/440>

<sup>2</sup> <https://id.scribd.com/document/394414168/Sejarah-Papua>

<sup>3</sup> <https://www.bnpt.go.id/hadapi-kelompok-separatis-teroris-kkb-sebagai-musuh-bersama-bnpt-ri-jangan-sampai-masyarakat-terbelah>

<sup>4</sup> <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>

ini dapat mencakup pelatihan, persediaan senjata, atau bantuan keuangan, yang memperumit konflik tersebut.

### Dampak Terorisme

Kegiatan terorisme oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan, politik, dan masyarakat di Papua. Hal ini terutama dirasakan dalam bentuk tidakamanan dan ketegangan yang berkelanjutan bagi masyarakat sipil (OAP dan Pendatang). Taktik *hit-and-run* dan serangan terhadap aparat negara yang dilakukan oleh KSTP sering kali membuat warga sipil menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi ini menyebabkan ketakutan masyarakat dan menahan perkembangan pola pikir serta pandangan terhadap masa depan mereka. Selain itu, kegiatan KSTP juga berdampak pada pembatasan akses dan mobilitas masyarakat. Serangan atau ancaman yang konstan dapat memaksa mereka untuk meninggalkan rumah, desa, atau bahkan tempat kerja mereka. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan fasilitas publik lainnya juga sering menjadi sasaran dan mengalami kerusakan, yang tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Papua, yang kaya akan keindahan alam, menjadi panggung untuk konflik yang kompleks. Sejak masa kolonial, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dengan berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial. Seiring berjalannya waktu, aspirasi untuk menciptakan otonomi khusus tumbuh yang bertujuan untuk memajukan serta meminimalisir pola pikir negatif terhadap pemerintahan Indonesia, namun beberapa kelompok (KSTP) mulai menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka serta terus menciptakan *image* yang buruk terhadap pemerintahan Indonesia (Muttaqin azmi, 2006). Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan dialog dan negosiasi untuk mencari solusi damai. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sipil, agar hasilnya dapat mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Namun, KSTP menolak dan terus melakukan penyerangan terhadap aparat negara serta melakukan tindakan kejam terhadap masyarakat sipil dan bahkan orang asli Papua. Pemerintah terus meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Papua yang dapat membantu mengatasi akar masalah konflik. Meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja dapat menyediakan alternatif konstruktif bagi orang Papua. Selain itu, memberdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik juga penting. Melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi, kaum muda, wanita, dan kelompok masyarakat lainnya dapat membentuk masa depan yang lebih baik untuk Papua.<sup>6</sup>

### Strategi Penanganan Terorisme di Papua

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di Papua meliputi tiga langkah strategis utama yang ditekankan oleh K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rycko Amelza Dahniel, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).<sup>7</sup> Langkah-langkah ini mencakup:

1. Penguatan Kolaborasi Multipihak. Upaya ini melibatkan kerjasama antar berbagai lembaga dan sektor dalam menangkal terorisme. Pendekatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun

<sup>6</sup> <https://cidiss.co/indonesia/law-and-security/attacking-civil-society-kst-papua-is-a-common-enemy/>

<sup>7</sup> <https://www.wapresri.go.id/hut-ke-13-bnpt-wapres-paparkan-tiga-langkah-strategis-tanggulangi-terorisme/>

- 2020-2024. Strategi ini juga mencakup langkah-langkah kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi, yang dijalankan bersama berbagai kementerian dan lembaga.
2. Pendekatan pada Kalangan Muda. Strategi ini menitikberatkan pada pemberdayaan dan pendidikan generasi muda mengenai moderasi beragama dan nilai-nilai kebangsaan, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.
  3. Pemantauan dan Pengawasan Media Sosial. Pemerintah menekankan pentingnya mengawasi media sosial untuk mencegah penyebaran narasi intoleran dan ujaran kebencian, terutama menjelang pemilihan umum.

Selain itu, BNPT juga berkoordinasi dengan aparat negara (TNI & Polri) dalam menghadapi KSTP di Papua, yang dianggap dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. BNPT memfokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dalam penanganan KSTP. Langkah-langkah ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi geografis dan kebutuhan untuk menghindari anggapan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode studi pustaka yang akan diperoleh dari sumber kepustakaan (umumnya buku, website, artikel, jurnal, dan lain sebagainya) atau menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomenanya yang diteliti.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Terminologi Terorisme di Papua

Penyebutan “Terorisme” atas konflik yang terjadi di Papua, khususnya yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok bersenjata di Papua yang mana mereka memiliki tujuan tertentu seperti motif politik, ekonomi, sosial hingga pada aksi separatisme, adalah hal yang sudah TEPAT. Hal tersebut dilakukan atas dasar fakta yang sudah disebutkan sebelumnya di atas serta beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Perubahan Dinamika Konflik. Peningkatan aktivitas terorisme di Papua, khususnya sejak tahun 2018, menandai perubahan signifikan dalam konflik di wilayah tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) meliputi kekerasan yang meningkat baik dalam intensitas maupun kecanggihan.
2. Evolusi Kelompok Separatis. Sejarah konflik di Papua menunjukkan perubahan nomenklatur dan intensitas kegiatan kelompok separatis dari masa ke masa. Mulai dari Organisasi Papua Merdeka hingga berubah menjadi KSTP, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas terorisme dan kekerasan.
3. Dukungan Terbatas dari OAP. KSTP tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat Papua atau Orang Asli Papua (OAP), dengan sebagian OAP menjadi korban aksi kekerasan dan terorisme oleh KSTP.
4. Motif dan Justifikasi KSTP. KSTP berdalih bahwa aksi mereka dilatar belakangi oleh tuduhan pelanggaran HAM dan penindasan oleh pemerintah Indonesia, walaupun Indonesia telah berupaya meningkatkan kesejahteraan OAP.

<sup>8</sup> Adlini, 2022, pp. 974-980

5. Penyebab Konflik Terorisme di Papua. Isu separatisme dan tidak puas masyarakat lokal terhadap pemerintah Indonesia merupakan penyebab utama konflik terorisme di Papua. Ketegangan sejarah antara Papua dan Indonesia juga berkontribusi pada permasalahan ini.
6. Dampak Terorisme di Papua. KSTP telah menyebabkan dampak signifikan terhadap keamanan, politik, dan masyarakat di Papua, termasuk tidak amanan dan ketegangan yang berkelanjutan.
7. Penanganan Terorisme oleh Pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam menanggulangi terorisme, termasuk kolaborasi berbagai pihak, pendekatan pada kalangan muda, dan pengawasan media sosial. Penerapan UU Terorisme dalam penanganan KKB Papua juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan hak asasi manusia.

Konflik di Papua yang khususnya aksi yang dilakukan oleh KSTP, dapat dianggap sebagai tindakan terorisme berdasarkan karakteristik dan dampak yang dihasilkannya. Penanganan konflik ini oleh pemerintah Indonesia menunjukkan upaya serius dalam mengatasi masalah terorisme di wilayah tersebut. Namun hal tersebut belum dapat memberikan hasil yang diharapkan, seperti menurunkan tingkat aktivitas terorisme di Papua. Dari tahun ke tahun aktivitas KSTP semakin masif mengakibatkan korban jiwa dari aparat negara (TNI & Polri) serta masyarakat sipil. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan jangan sampai konflik ini meningkat yang dapat meruntuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sejatinya meskipun skalanya KSTP yang terbilang kecil, aktivitas mereka telah mengancam Kedaulatan NKRI.

### **Strategi yang telah dilakukan**

Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sudah jelas berupa Terorisme yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Multifaset Terhadap Terorisme. Strategi Indonesia dalam menangani terorisme di Papua mencakup pendekatan multifaset (berbagai sisi dan melibatkan pihak terkait) yang mencerminkan kompleksitas fenomena terorisme itu sendiri. Ini termasuk upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang ketat.
2. Kolaborasi Multipihak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan pendekatan kolaboratif dalam menanggulangi terorisme, yang melibatkan kerjasama antar berbagai lembaga dan sektor (TNI, Polri, Pemda, Komnas Ham, Aktifis, Nakes, DII). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
3. Fokus pada Kalangan Muda. Strategi penanganan terorisme juga menekankan pada pemberdayaan dan pendidikan generasi muda. Ini bertujuan untuk mencegah radikalisisasi dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam menyebarkan nilai moderasi beragama dan kebangsaan.
4. Pemantauan Media Sosial. Pengawasan media sosial menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencegah penyebaran narasi intoleran dan ujaran kebencian, khususnya menjelang pemilihan umum.
5. Penerapan Undang-Undang Terorisme. Pemerintah Indonesia, melalui BNPT, bekerja sama dengan aparat negara (TNI & Polri) serta penegak hukum dalam menangani Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua dengan menerapkan Undang-Undang tentang Terorisme. Pendekatan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi geografis dan hak asasi manusia.

6. Pembentukan Satuan Tugas. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan telah membentuk Satuan Tugas di bawah naungan Mabes TNI yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan Pengamanan. Satuan tugas yang di awaki oleh pasukan TNI ini berbentuk Satgaspamrahan (Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan) dan Satgaspamtas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) yang bertugas di wilayah Papua.

Yang perlu di garis bawahi dari Strategi yang telah dibentuk dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah Pembentukan Satuan Tugas, dimana pembentukan ini dinilai masih kurang optimal menumpas KSTP. Namun setidaknya berdampak langsung dan mampu meredam serta meminimalisir aksi Terorisme yang terjadi di wilayah Papua.

## KESIMPULAN

Dalam dinamika konflik yang terjadi, terdapat peningkatan signifikan dalam aktivitas terorisme di Papua, terutama sejak tahun 2018, yang menandai perubahan dinamika konflik di wilayah tersebut. Eskalasi kekerasan dan kecanggihan operasi oleh KSTP menunjukkan pergeseran strategi dalam mencapai tujuan separatisme mereka. Sejarah konflik yang terjadi di Papua menunjukkan evolusi kelompok separatis dari OPM menjadi KSTP, yang mencerminkan peningkatan aktivitas terorisme dan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat sipil. Sehingga KSTP layak dianggap sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus ditumpas dari Indonesia. Terlebih lagi KSTP tidak mendapatkan dukungan penuh dari Orang Asli Papua (OAP), dengan sebagian besar OAP menjadi korban dari aksi kekerasan dan terorisme. Dan mayoritas OAP menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Meskipun KSTP mengklaim bahwa aksi mereka merupakan reaksi terhadap pelanggaran HAM dan penindasan terhadap OAP oleh pemerintah Indonesia, namun faktanya pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan OAP melalui berbagai program pembangunan. Aksi yang dilakukan oleh KSTP telah menyebabkan dampak yang ekstrem terhadap keamanan, politik, dan sosial masyarakat di Papua, menciptakan ketidak amanan dan ketegangan yang berkelanjutan. Korban jiwa yang jatuh tidak hanya dari aparat negara (TNI & Polri) yang melakukan kontak senjata langsung dengan KSTP, tapi masyarakat sipil baik OAP ataupun pendatang juga menjadi korban dari kekejaman KSTP. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi multifaset dalam menanggulangi terorisme, termasuk kolaborasi multipihak, pendekatan pada kalangan muda, pemantauan media sosial, dan penerapan UU Terorisme, namun tantangan masih tetap ada. Sehingga kekuatan bersenjata turut diterjunkan untuk menahan aksi KSTP melalui pembentukan Satuan Tugas dari Mabes TNI (Satgaspamrahan dan Satgaspamtas). Kesimpulannya, konflik terorisme di Papua merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif, melibatkan semua *stakeholder*, termasuk masyarakat sipil, untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menanggulangi terorisme, namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi akar masalah konflik di Papua.

## Temuan Utama

Penelitian ini menunjukkan bahwa terorisme di Papua yang dilakukan oleh KSTP adalah suatu bentuk nyata ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus memakan korban, dengan didukung oleh fakta-fakta di lapangan. Implikasinya terhadap keamanan nasional sangat serius dan harus segera ditindaklanjuti.

## Rekomendasi

Berdasarkan temuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis alternatif untuk mengatasi terorisme di wilayah tersebut, serta peningkatan status ancaman KSTP menjadi status Darurat Militer sehingga dibutuhkan Satuan Tugas Operasi Tempur atau Operasi Militer Perang (OMP) seperti halnya yang telah dilakukan terhadap GAM di Aceh. (jabawan pertanyaan).

## Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan terhadap Dosen Mata Kuliah DOT (Definition, Origins and Trends of Terrorism) dalam mendukung kelancaran perkuliahan dan membantu mengarahkan dalam menyelesaikan pembuatan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Karnavian, M. T. (2017). The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(9), 8–13. <http://www.jstor.org/stable/26351551>
- Mitra Atallah Syahputra, & Askana Fikriana. (2023). Analisis Pandangan Fikih Siasah Terhadap Tindakan Terorisme: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Keadilan Sosial. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 01–16. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.830>
- Muttaqin azmi. (2006). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua Azmi Muttaqin. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5–18. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAp-rcg8aFAxW8UWwGHXj1BksQFnoECCsQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fpolitika%2Farticle%2FdownloadSuppFile%2F6064%2F280&usg=AOvVaw1Jze\\_RUt5-1vz9iWfievSN&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAp-rcg8aFAxW8UWwGHXj1BksQFnoECCsQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fpolitika%2Farticle%2FdownloadSuppFile%2F6064%2F280&usg=AOvVaw1Jze_RUt5-1vz9iWfievSN&opi=89978449)
- Nasution, A. R. (2015). Terorisme Di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 54–74. <https://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/t>
- Ramadhanty, A. (2019). *Terorisme sebagai Ancaman Keamanan Dunia dan Pengaturannya Dalam Hukum Internasional*. 1–17.
- Reksoprodjo, A. H. S., Widodo, P., Timur, F. G. C., Peperangan, P., Fakultas, A., Pertahanan, S., & Pertahanan, U. (2018). Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia (Mapping the Background and Motive of Terrorists in indonesia). *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4(2), 17–18.
- Saella Fitriana. (2016). Upaya Bnpt Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 1(12), 13.
- Widjajanto, A. (2023). Pola Kekerasan di Papua. *Pola Kekerasan Di Papua*, 32, 24. [https://www.lemhannas.go.id/images/2023/Materi\\_KUP/2501\\_FGD\\_Hankam.pdf](https://www.lemhannas.go.id/images/2023/Materi_KUP/2501_FGD_Hankam.pdf)
- Junaid, H. (2013). Pergerakan kelompok terorisme dalam perspektif barat dan islam. Sulesana: *Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 118-135. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1285>
- Budiarti, A.P. 2021. Peneliti LIPI Beberkan 4 Akar Konflik Papua. <https://www.gatra.com/news-511639-politik-peneliti-lipi-beberkan-4-akar-konflik-papua.html>
- CNN Indonesia. 2020. Otsus dan Api Konflik Papua di Tangan Pemerintah Pusat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929140453-20-552252/otsus-dan-api-konflik-papua-di-tangan-pemerintah-pusat>



- CNN Indonesia. 2021. Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris>
- EASTASIAFORUM. 2023. Hostage situation reinforces tensions in Papua. <https://eastasiaforum.org/2023/12/02/hostage-situation-reinforces-tensions-in-papua/>
- Habib, R. 2021. Operasi Intelijen di Papua. <https://news.detik.com/kolom/d-5558261/operasi-intelijen-di-papua>
- Junaid, Hamzah. 2013. Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1285>
- Papua. <https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1337305-pasukan-elite-tempur-tengkorak-diterbangkan-operasi-tni-papua>
- Sabarofek, Tin. Sejarah Papua Tidak Terlepas Dari Masa Lalu Indonesia. <https://id.scribd.com/document/394414168/Sejarah-Papua>
- Wicaksono, B.A.2021. Pasukan Elite Tempur Tengkorak Diterbangkan Operasi TNI. <https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1337305-pasukan-elite-tempur-tengkorak-diterbangkan-operasi-tni-papua>
- Widadio, N.A. & Latief, M.N. 2019. Riwayat Konflik Papua, Tanah Kaya di Ujung Timur Indonesia. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906>
- Widjojo, Muridan. 2012. Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua. <https://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/viewFile/649/440>
- Widjajanto, Andi. (2023). Pola Kekerasan di Papua. <https://www.lemhannas.go.id/images2023Materi KUP2501 FGD Hankam.pdf>